

Peran Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Wisata Kampung Madu)

The Role of Kediri Regency Government Policies in Tourism Development (A Case Study of Kampung Madu Tourism Village)

Sonia Yulida^{1*}, Agus Machfud Fauzi²

¹Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: soniayulida.22013@mhs.unesa.ac.id, agusmfauzi@unesa.ac.id

Abstrak: Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Desa Wisata Kampung Madu di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri merupakan destinasi wisata edukasi yang berbasis budidaya lebah madu dan memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian lokal. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta promosi digital yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemerintah desa, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri, serta anggota DPRD. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan mediator dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah desa berperan dalam penyusunan Peraturan Desa, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan pemerintah kabupaten berperan dalam pelatihan sumber daya manusia, promosi pariwisata, dan kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kemampuan teknologi pengelola, serta belum meratanya partisipasi masyarakat.

Abstract: The development of tourism villages has become one of the strategies of local governments to promote community-based tourism development. Kampung Madu Tourism Village in Bringin Village, Badas District, Kediri Regency is an educational tourism destination based on honeybee cultivation and has significant potential to support the local economy. However, its development still faces several challenges, such as limited infrastructure, human resource capacity, and suboptimal digital promotion. This study aims to analyze the role of Kediri Regency government policies in the development of Kampung Madu Tourism Village. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. The research informants consist of village government officials, tourism village managers, local communities, the Kediri Regency Tourism Office, and members of the Regional House of Representatives (DPRD). Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that government policies play roles as facilitators, regulators, and mediators in the development of the tourism village. The village government plays a role in drafting village regulations, strengthening institutional capacity, and increasing community participation, while the regency government contributes through human resource training, tourism promotion, and cross-sector collaboration. Nevertheless, policy implementation still faces several challenges, including budget limitations, the technological capacity of the managers, and uneven community participation.

Article History

Received: 25 February 2026

Revised: 28 February 2026

Published: 13 March 2026

Kata Kunci :

kebijakan pemerintah, desa wisata, Kampung Madu, pariwisata berbasis masyarakat

Keywords :

government policy, tourism village, Kampung Madu, community-based tourism



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18993563>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat identitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang saat ini banyak dikembangkan adalah desa wisata. Desa wisata dipandang sebagai model pariwisata alternatif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat memungkinkan terjadinya pemerataan manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penguatan sosial budaya masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, penyediaan infrastruktur, pendanaan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah Kabupaten Kediri secara bertahap mendorong pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata daerah. Salah satu desa wisata yang berkembang adalah Desa Wisata Kampung Madu yang berlokasi di Desa Bringin, Kecamatan Badas. Desa wisata ini mengusung konsep wisata edukasi berbasis budidaya lebah madu, yang mengombinasikan aspek edukasi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Madu memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan desa wisata lainnya.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan Desa Wisata Kampung Madu masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung wisata, promosi digital yang belum optimal, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata yang masih terbatas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan potensi wisata saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan pengembangan desa wisata tanpa adanya kebijakan pemerintah yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan mediator dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah desa berperan dalam menyediakan kerangka regulasi melalui Peraturan Desa, penguatan kelembagaan, serta pengorganisasian masyarakat. Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan dalam memberikan dukungan teknis, pelatihan, promosi pariwisata, serta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi bentuk kebijakan yang diterapkan, tetapi juga menganalisis implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan kondisi sosial ekonomi lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sosiologi pariwisata sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam peran kebijakan pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu. Penelitian dilaksanakan di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan penelitian meliputi Kepala Desa Bringin, pengelola Desa Wisata Kampung Madu, perangkat desa, masyarakat lokal, perajin produk madu, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri, serta anggota DPRD Komisi II.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan regulasi yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan desa wisata secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah desa berperan dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mekanisme pengelolaan desa wisata, pembagian peran pengurus, serta penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pelatihan pengelolaan pariwisata, pendampingan teknis, serta dukungan promosi wisata. Bentuk kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang terarah dan terintegrasi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran dan belum meratanya intensitas pendampingan kepada pengelola desa wisata.

Aksesibilitas dan Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal

Aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan pengembangan pariwisata masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu. Meskipun kebijakan telah dirumuskan, tidak seluruh masyarakat memahami secara utuh isi dan tujuan kebijakan tersebut. Informasi mengenai program pemerintah, pelatihan, dan bantuan sering kali hanya diterima oleh pengurus inti desa wisata, sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai mediator yang seharusnya menjembatani komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaksana utama desa wisata. Keterbatasan akses informasi berimplikasi pada rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat dalam kegiatan pariwisata, meskipun mereka berada di lingkungan desa wisata.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam kegiatan produksi madu, pengelolaan wisata edukasi, serta pengembangan usaha mikro berbasis olahan madu. Masyarakat yang terlibat secara aktif merasakan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan peluang kerja.

Namun demikian, partisipasi masyarakat belum bersifat menyeluruh. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri dalam

mengelola pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek utama dalam pengembangan desa wisata.

Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan terhadap Masyarakat Lokal

Kebijakan pengembangan Desa Wisata Kampung Madu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Secara ekonomi, pengembangan desa wisata membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, seperti perajin produk madu, pemandu wisata, serta pelaku usaha mikro lainnya. Peningkatan aktivitas wisata turut mendorong perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat langsung.

Secara sosial, kebijakan pemerintah mendorong terbentuknya kerja sama dan solidaritas antarwarga melalui kegiatan pengelolaan desa wisata. Masyarakat mulai membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kualitas layanan wisata dan kelestarian lingkungan. Namun, di sisi lain, perbedaan tingkat keterlibatan masyarakat juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antara warga yang aktif terlibat dan warga yang belum merasakan manfaat secara langsung.

Analisis Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, kebijakan pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), di mana pemerintah bertindak secara rasional dengan memilih kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan regulasi, penyediaan fasilitas, serta program pelatihan merupakan bentuk tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata juga dapat dipahami sebagai tindakan rasional nilai (*wertrational*), di mana masyarakat terlibat tidak hanya karena motif ekonomi, tetapi juga karena nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan kebanggaan terhadap potensi desa. Namun, masih ditemukannya masyarakat yang pasif menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai kebijakan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan nilai dan kesadaran kolektif masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu di Desa Bringin, Kecamatan Badas. Kebijakan pemerintah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator dalam menggerakkan potensi pariwisata berbasis masyarakat. Peran pemerintah desa diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Desa, penguatan kelembagaan pengelola wisata, serta pengorganisasian partisipasi masyarakat. Sementara itu, pemerintah kabupaten berkontribusi melalui program pelatihan sumber daya manusia, dukungan promosi pariwisata, serta pembangunan jejaring kerja sama lintas sektor.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan Desa Wisata Kampung Madu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat, serta mendorong terbentuknya kerja sama dan solidaritas sosial dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat yang terlibat aktif merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata, khususnya dalam sektor produksi madu, wisata edukasi, dan usaha mikro berbasis olahan madu.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Keterbatasan anggaran, kapasitas teknologi pengelola yang masih rendah, serta belum meratanya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam pengembangan desa wisata. Sebagian masyarakat masih berada pada posisi pasif akibat keterbatasan akses informasi dan kemampuan pengelolaan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih perlu diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif teori tindakan sosial Max Weber, kebijakan pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Madu dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat mencerminkan tindakan rasional nilai yang didorong oleh kesadaran kolektif, nilai kebersamaan, dan kepedulian terhadap potensi desa. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang bersifat teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun nilai, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam kajian sosiologi pariwisata sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

REFERENSI

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 112–124.
- Joko Utomo, S., & Satriawan, B. (2017). Strategi pengembangan desa wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 11(2), 85–96.
- Junaedi, J., Saefulrahman, I., & Sutisna, J. (2022). Strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata di Kabupaten Kuningan Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2), 250–259.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniasih, D., & Pratama, R. (2021). Dinamika sosial dalam pengembangan desa wisata: Analisis perubahan sosial masyarakat lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 33–47.
- Lestari, S., & Hamzah, F. (2023). Aksesibilitas masyarakat terhadap program pemerintah dalam sektor pariwisata berbasis desa. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 88–102.
- Mahendra, R., & Yusuf, A. (2022). Ketidakmerataan manfaat ekonomi desa wisata dan implikasinya terhadap hubungan sosial masyarakat. *Journal of Rural Tourism Studies*, 2(3), 71–84.
- Marlan, M. W., & Prathama, D. A. (2023). Pemberdayaan kelompok peternak lebah di Kampung Madu Dusun Purworejo Desa Bringin Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 8(6), 39–46.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, G. (2021). *The role of local governments in developing natural and cultural tourism in*

- Sukabumi District. *Jurnal Papatung*, 4(1), 36–47.
- Ningtyas, T., Mutafarida, B., & Puspitasari, I. R. (2022). Kajian pengembangan desa wisata berbasis komunitas di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 197–211.
- Salsabila, M. S., & Fauzi, A. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Studi kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 1–12.
- Setiawan, T. (2024). Provincial government intervention in the development of flagship tourism areas: Strategies and interpretive frameworks. *Journal of Regional Tourism Studies*, 6(1), 45–60.
- Suning, & Rahmadhan, S. H. (2022). Strategi pengembangan Desa Wisata Mejono Kabupaten Kediri berbasis ekonomi kreatif. *Jurnal Plano Buana*, 3(1), 23–33.
- Tyas, N. W., & Damayanti, M. (2018). Potensi pengembangan Desa Kliwonan sebagai desa wisata batik di Kabupaten Sragen. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 74–89. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.74-89>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Wulandari, E., & Arifin, Z. (2021). Model kebijakan pembangunan desa wisata: Tantangan implementasi dan tingkat partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 3(2), 102–118.
- Yuliansyaf, T. P. (2021). Analisis dampak pengembangan desa wisata terhadap perekonomian masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 55–68.